

ANALISIS PAJAK PEMBANGUNAN I PERHOTELAN SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH

Studi Kasus : Kotamadya Yogyakarta

Ahmad Jamli dan Astuti Rahayu

Abstract

In organising the deregulation principle of the organization of regional government, the national government gives an authority for the regional government to organize its own region. Therefore, the regional government has to raise regional tax to fund its region expenditures. The regional government has many income sources. Unfortunately, most of them are inefficient sources because the regional government always has to spend a lot of costs to collect the income than the income itself.

This article researches efforts organised by Yogyakarta municipality in increasing its regional income, especially in collecting income tax of hotel managements in Yogyakarta. This article concludes that the collecting of it is still inefficient. Therefore, the regional government of Yogyakarta has to set a better strategy to fix it. That is, fixing internal elements and increasing effectivity. It have to be supported by society and departments connected.

Menurut Harord, A. Aldefer (1964) (dalam Alfian Lians, 1985), dalam hal keuangan, pemerintah mempunyai peranan yang sangat penting di negara yang sedang berkembang dibandingkan dengan di negara maju. Kondisi keuangan daerah di negara yang sedang berkembang pada hakekatnya mempunyai karakteristik sebagai berikut : (1). Sangat minimnya bagian pendapatan daerah yang dimanfaatkan untuk kepentingan daerah. (2). Sebagian besar sumbangan berasal dari subsidi atau bantuan pemerintah pusat. (3). Kontribusi pajak daerah dan PAD terhadap penerimaan daerah total sangat kecil karena hampir semua pajak di daerah telah dijadikan pajak sentral dan dipungut oleh pemerintah pusat. (4). Terdapat campur tangan yang besar dari pemerintah pusat terhadap keuangan daerah.

Menurut Nick Devas, 1989, hal 59, bagi Daerah Tingkat II (Dati II), pajak daerah merupakan pos pendapatan kedua terbesar dalam PAD setelah retribusi daerah. Hingga saat ini, dari 37 jenis pajak yang dikenakan di Dati II, terdapat 7 jenis pajak yang tetap menjadi andalan Pemerintah Daerah Dati II, yaitu Pajak Pembangunan I, Pajak Penerangan Jalan, Pajak

Pertunjukan dan Keramaian Umum, Pajak Reklame, Pajak Pendaftaran Perusahaan, Pajak Potong Hewan, dan Pajak Bangsa Asing. Di Dati II, 85% pendapatan daerah berasal dari 7 sumber pajak di atas.

Bagi Kodya Yogyakarta, penerimaan pajak menduduki peringkat teratas dari sumbangannya terhadap PAD, yaitu sebesar 51,46% rata-rata pertahun. Namun jika dilihat dari laju pertumbuhannya selama 5 tahun terakhir, terjadi kecenderungan menurun. Sumbangan PAD terhadap total penerimaan mengalami kenaikan sebesar 9,4% dari tahun 1992/1993 ke 1993/1994, sedang sumbangan pajak terhadap PAD mengalami penurunan sebesar 7,9% pada tahun yang sama, meskipun jumlah nominal penerimaan sektor pajak mengalami peningkatan. Hal ini mengindikasikan bahwa potensi pajak belum digali secara maksimal.

Pajak Pembangunan I (PP I) mempunyai prospek yang potensial sebagai sumber penerimaan Pemda Dati II Kodya Yogyakarta, karena memiliki obyek pajak yang besar. Penerimaan dari PP I memberikan kontribusi yang besar terhadap PAD. Namun peningkatan ini bukan secara otomatis

menunjukkan bahwa penarikan pajak sudah efektif dan efisien. Sumbangan pajak terhadap PAD yang cenderung menurun dapat mengindikasikan bahwa komponen-komponen PAD belum digali secara optimal. Tulisan ini akan membahas masalah bagaimana pelaksanaan penerimaan pajak dan prospek PP I dikhususkan pada PP I Perhotelan, sebagai salah satu sumber PAD Kodya Yogyakarta, serta upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penerimaannya sesuai dengan sistem dan ketentuan yang berlaku.

Hipotesis yang digunakan dalam tulisan ini adalah : (1). diduga penetapan taret PP I Perhotelan belum sesuai dengan potensi yang ada, (2). diduga administrasi pemungutan PP I Perhotelan sudah efisien tetapi belum efektif. (3). diduga penerimaan PP I Perhotelan terus meningkat di tahun-tahun yang akan datang, (4). diduga upaya peningkatan penerimaan PP I Perhotelan masih dapat ditingkatkan.

Data yang digunakan yaitu : (1) data primer, yang diambil langsung dari responden. Meliputi jumlah kamar hotel yang tersedia, jumlah tamu yang menginap, tarif kamar, persentase tingkat hunian kamar double dan kamar Single, dan jumlah kamar yang terjual. (2). data sekunder, yang diperoleh dari Biro Pusat Statistik DIY, meliputi : jumlah kamar hotel, jumlah hotel, tarif kamar, persentase tingkat hunian kamar, dan perkembangan PPI.

PENDAPATAN ASLI DAERAH

Menurut JB. Kristiadji, (1985) yang dimaksud Pendapatan Asli Daerah dalam arti sempit adalah Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PAD). Undang-Undang no. 5 tahun 1974 sendiri yang mengatur tentang Pokok-Pokok Pemerintah di Daerah tidak menyebutkan pengertian Pendapatan Asli Daerah, hanya komponen-komponen PAD, yang meliputi : a. Hasil pajak daerah b. Hasil retribusi daerah c. Hasil laba perusahaan daerah d. Penerimaan lain-lain. Pengertian tentang pajak daerah seperti yang dikemukakan oleh Josef Riwu Kaho (1995) hal. 129, yang dimaksud dengan pajak

daerah adalah : pajak negara yang diserahkan kepada daerah untuk dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik. Sementara menurut L.J. Davey, Pajak Daerah dapat diartikan sebagai: (1) Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dengan pengaturan dari daerah sendiri, (2) Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional, tetapi penerapan tarifnya dilakukan oleh pemerintah daerah sendiri, (3) Pajak yang ditetapkan atau dipungut oleh pemerintah daerah, (4) Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat tetapi hasil pungutannya diberikan kepada, dibagihasilkan dengan, atau dibebani pungutan tambahan oleh pemerintah daerah.

TOLOK UKUR MENILAI HASIL PAJAK DAERAH

Menurut Nick Devas (1985), untuk menilai hasil pajak daerah, tolok ukur yang digunakan, yakni: (1) Upaya pajak (*tax effort*) : Upaya pajak adalah jumlah pajak yang dapat dikumpulkan dari dasar pajak (*tax base*), yang biasanya berupa pendapatan perkapita, (2) Hasil guna (*effectiveness*) : Hasil guna mengukur hubungan antara hasil pungut suatu pajak dengan potensi pajak itu, dengan anggapan semua wajib pajak membayar pajak masing-masing. Hasil guna menyangkut semua tahap administrasi penerimaan pajak, yaitu menentukan wajib pajak, menetapkan nilai kena pajak, memungut pajak, menegakkan sistem pajak, dan membukukan penerimaan. Ada tiga faktor yang mengancam hasil guna, yaitu menghindari pajak oleh wajib pajak, kerjasama antara petugas pajak dengan wajib pajak untuk mengurangi jumlah pajak terhutang, dan penipuan oleh petugas pajak, yang pajak menggantungi dari hasil pajak, (3) Daya guna (*efficiency*) : Daya guna mengukur bagian dari hasil pajak yang digunakan untuk menutup biaya pemungutan pajak bersangkutan. Selain mencakup biaya langsung kantor pajak bersangkutan, daya guna juga memperhitungkan biaya tidak langsung dari kantor pajak.

POTENSI PP I PERHOTELAN

Potensi PP I Perhotelan dimaksudkan sebagai kemampuan untuk menghasilkan pajak atau kemampuan yang pantas dikenakan pajak (*taxable capacity*), dalam keadaan 100%. Yang menjadi obyek PP I Perhotelan adalah hotel, pondok wisata, pesanggrahan, dan sejenisnya.

Rumus penghitungan potensi, yaitu :

$$P = Tk \times Jk \times Th \times Hr \times Tp$$

dimana :

- P = Potensi PP I Perhotelan, seluruh hotel di Kodya Yogyakarta
- Tk = Tarif kamar, merupakan rata-rata tarif kamar hotel berbintang dan melati
- Jk = Jumlah seluruh kamar hotel berbintang dan melati
- Hr = Jumlah hari dalam 1 tahun, dihitung 365 hari
- Tp = Tarif Pajak = 10%

Dalam menghitung potensi ini, digunakan asumsi : (a). tingkat hunian kamar hotel berbintang : *single* = 37,5 %, *double* = 60%, *suit* = 2,5%. Sedang untuk (b). tingkat hunian kamar hotel non bintang (melati) adalah *single* = 30%, dan *double* = 70%. Sedangkan hasil perhitungan potensi PP I Perhotelan sebagai berikut (tabel 1).

Dari Tabel 1 dapat dilihat bahwa potensi PP I Perhotelan selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, selama kurun waktu 1985/1986 - 1994/1995, dengan pertumbuhan rata-rata 34,27%. Kenaikan ini disebabkan oleh semakin banyaknya jumlah akomodasi, meningkatnya jumlah wisatawan, maupun meningkatnya golongan suatu hotel. Sedang data untuk target penerimaan PP I Perhotelan, hanya tersedia selama 5 tahun anggaran terakhir. Selama 5 tahun anggaran tersebut rata-rata penetapan target terhadap potensi baru 25,22%, meskipun penetapan target ini selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.

EFISIENSI PP I PERHOTELAN

Efisiensi atau daya guna mengukur bagian dari hasil pajak yang digunakan untuk menutup biaya pemungutan pajak yang bersangkutan. Semakin kecil biaya yang digunakan, semakin tinggi tingkat efisiensinya. Rumus Perhitungan Potensi sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Biaya pungut PP I Perhotelan}}{\text{Realisasi PP I Perhotelan}} \times 100\%$$

Menurut Nick Devas, (1985), efisiensi dikatakan rendah apabila lebih dari 40% hasil pajak terpakai untuk biaya pemungutan. Namun demikian, tinggi rendahnya tingkat efisiensi tidak ada ukuran yang pasti, karena tingkat efisiensi tersebut relatif bagi masing-masing daerah.

Efisiensi diukur dengan membandingkan biaya pungut yang digunakan dengan realisasi penerimaan pajak. Biaya pungut PP I Perhotelan dalam hal ini merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah untuk memungut pajak, yang terdiri dari biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung merupakan biaya operasional yang terdiri dari biaya belanja barang, pemeliharaan, perjalanan dinas, dan biaya lain-lain. Biaya belanja pegawai tidak termasuk biaya pungutan, karena biaya tersebut berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah tingkat I, jadi tidak dianggarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kodya Yogyakarta. Biaya tidak langsung pemungutan PP I Perhotelan diasumsikan sebesar 1/6 bagian atau 16,67% dari total biaya tidak langsung. Sedangkan biaya langsung merupakan upah insentif bagi petugas pemungut yang besarnya telah ditentukan sebanyak 5% dari realisasi penerimaan per tahun anggaran.

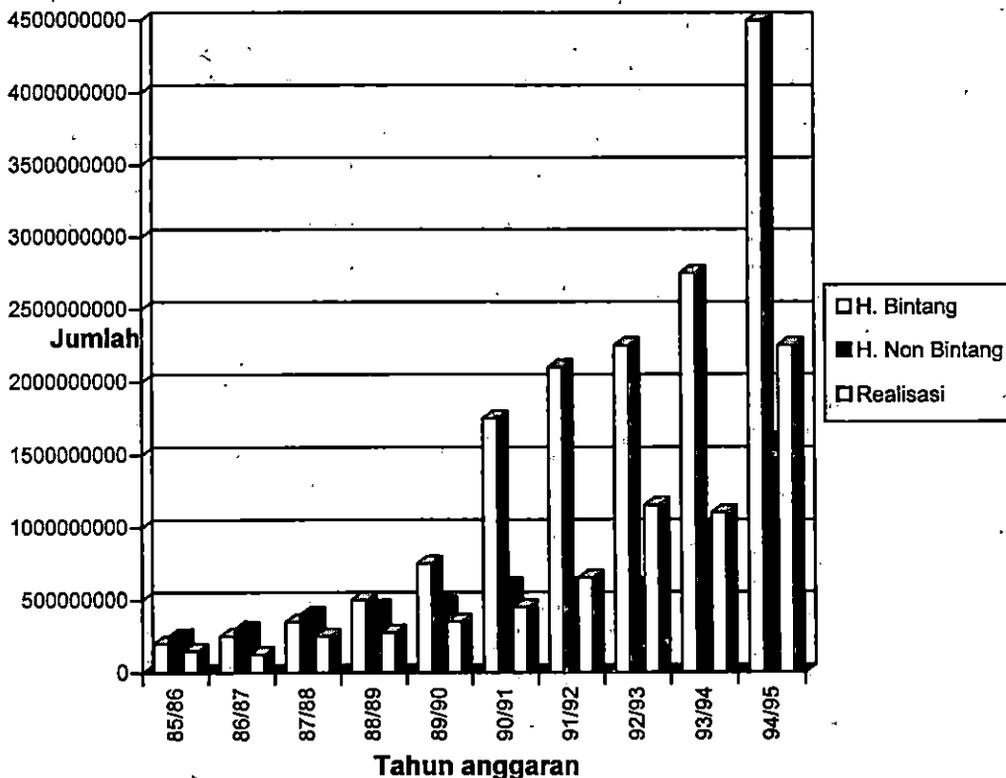
Tingkat efisiensi terendah terjadi tahun 1985/1986, karena 24,12% dari penerimaan PP I Perhotelan digunakan untuk biaya pemungutan. Tingkat efisiensi tertinggi terjadi pada tahun 1994/1995, karena hanya 9,33% dari penerimaan PP I Perhotelan digunakan untuk menutup biaya

Tabel 1
Potensi PP I Hotel Berbintang dan Non Bintang 1985/1986 - 1994/1995 (Rupiah)

Tahun Anggaran	Penerimaan/ T.A. (Hotel Bintang)	Potensi Pajak/T.A. (Hotel Bintang)	Penerimaan/ T.A. (H. Non Bintang)	Potensi Pajak/ T.A. (H. Non Bintang)	Total Potensi Penerimaan Pajak	Per-tumbuhan Potensi (%)	Target Penerimaan	Target terhadap Potensi (%)
1985/1986	2.016.622.884,31	201.662.288,43	2.851.392.640,18	285.139.264,02	468.801.552,45	-	-	-
1986/1987	2.705.768.669,79	270.576.866,98	3.002.307.907,80	300.230.790,78	750.807.657,76	17,62	-	-
1987/1988	3.475.529.741,30	347.552.974,13	3.588.251.176,21	358.825.117,62	706.378.091,75	23,75	-	-
1988/1989	4.925.408.341,26	492.540.834,13	3.832.712.864,19	383.271.286,42	875.812.120,55	23,99	-	-
1989/1990	7.929.182.830,42	792.918.283,04	4.569.128.968,97	456.912.896,90	1.249.831.179,94	42,71	-	-
1990/1991	18.570.562.755,89	1.857.056.755,89	6.318.163.269,00	631.816.326,90	2.448.872.602,49	99,14	388.073.000	15,59
1991/1992	21.679.587.005,93	2.167.958.700,59	6.256.928.807,32	625.692.880,73	2.793.651.581,33	12,25	603.768.000	21,65
1992/1993	22.609.255.458,03	2.260.925.545,80	6.462.226.503,61	646.222.650,36	2.907.148.196,16	04,06	766.500.000	26,63
1993/1994	28.248.003.854,70	2.824.800.385,47	10.369.276.659,64	1.036.927.665,96	3.861.728.051,11	32,12	1.146.381.200	29,68
1994/1995	42.878.003.222,27	4.287.800.322,23	16.372.244.878,30	1.637.224.487,83	5.925.024.809,91	53,45	1.193.503.000	32,60
						34,27		25,22

Sumber: 1990/1991 - 1994/1995, *Data Primer*, diolah
1985/1986 - 1993/1994, *Statistik Perhotelan dan Akomodasi Kodya Yogyakarta*, BPS, DIY, diolah.

Gambar 1
Potensi Hotel Bintang, Non Bintang, dan Realisasi Total Penerimaan



pemungutan pajak. Efisiensi rata-rata PP I Perhotelan selama 1 tahun anggaran tersebut cukup baik, karena biaya pungut hanya meny-erap 15,82% dari realisasi penerimaan per tahun.

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Biaya pungut PP I Perhotelan}}{\text{Realisasi PP I Perhotelan}} \times 100\%$$

EFEKTIFITAS PP I PERHOTELAN

Efektifitas atau hasil guna mengukur hubungan antara realisasi penerimaan pajak dengan potensinya. Rumus penghitungan efektifitas adalah :

Menilik kriteria Nick Devas, jika hasil perbandingan ini melebihi 60%, maka pemungutan dapat dikatakan efektif. Namun demikian, tinggi

Tabel 2.
Efisiensi dan Efektifitas PP I Perhotelan 1985/1986 - 1994/1995

TAHUN	BIAYA PUNGUT (RUPIAH)	REALISASI PENERIMAAN (RUPIAH)	EFISIENSI (%)	POTENSI (RUPIAH)	EFEKTIFITAS (%)
1985/1986	29.999.908,20	124.385.158,00	24,12	468.801.552,45	25,55
1986/1987	34.391.969,03	164.665.074,00	20,88	570.807.657,76	28,85
1987/1988	34.958.627,54	202.108.625,00	17,30	706.378.091,75	28,61
1988/1989	37.133.784,56	237.337.118,00	15,65	875.812.120,55	27,10
1989/1990	45.440.531,96	321.021.076,00	14,15	1.249.831.179,94	25,69
1990/1991	77.186.163,84	448.613.338,00	17,21	2.488.872.602,49	18,02
1991/1992	125.853.217,06	704.750.561,00	17,86	2.793.651.581,33	25,23
1992/1993	119.350.932,63	1.169.006.899,00	10,21	2.907.148.196,16	40,21
1993/1994	134.539.979,60	1.171.612.102,00	11,48	3.861.728.051,11	30,50
1994/1995	214.310.962,15	2.296.054.843,00	9,33	5.925.024.809,91	38,75
Rerata			15,82		28,86

Sumber: Dinas pendapatan Daerah, Kodya Yogyakarta, diolah.

rendahnya tingkat efektifitas tidak ada ukuran yang pasti. karena tingkat efektifitas relatif bagi masing-masing daerah. Tingkat efektifitas rata-rata per tahun PP I Perhotelan Kodya Yogyakarta selama tahun 1985/1986-1994/1995 adalah 28.86%. Ini berarti baru 28, 86% dari potensi yang dapat dipungut pajaknya.

Rendahnya tingkat efektifitas ini disebabkan oleh masih rendahnya penetapan target, yang didasarkan pada realisasi penerimaan tahun sebelumnya, kemudian dinaikkan 10% hingga 15% per ayat penerimaan. Penetapan target adalah hal yang sangat penting, sebab jika target terlalu tinggi, maka usaha dalam pencapaian akan mengalami kesulitan. Sebaliknya jika target ditentukan terlalu rendah, maka penerimaan

pajak tidak maksimal. Oleh karena itu, perlu diperhitungkan potensi yang sebenarnya sebelum menentukan target.

PROYEKSI PENERIMAAN PP I PERHOTELAN

Ketersediaan dana dimasa datang sangat tergantung dari besarnya pendapatan yang diperkirakan diperoleh pada masa tersebut. Untuk itu, perlu diramalkan besarnya realisasi PP I Perhotelan yang diharapkan akan diterima. Metode yang digunakan adalah trend eksponensial dengan kuadrat terkecil (*least square*). Metode ini dipilih karena melihat perkembangan penerimaan PP I Perhotelan dari tahun 1985/1986-1994/1995 cenderung berbentuk grafik eksponen.

Tabel 3.
Perhitungan Trend

TAHUN	PENERIMAAN	LOG Y	X	X ²	X LOGY	TREND
1985/1986	124.385.158	8,09	-9	81	-72,85	107.045.818
1986/1987	164.665.074	8,22	-7	49	-57,52	147.015.078
1987/1988	202.108.625	8,31	-5	25	-41,53	201.908.245
1988/1989	237.337.118	8,38	-3	9	-25,13	227.297.675
1989/1990	321.021.076	8,51	-1	1	-8,51	380.836.358
1990/1991	448.613.338	8,65	1	1	8,65	523.034.790
1991/1992	704.750.561	8,85	3	9	26,54	718.327.929
1992/1993	1.169.006.899	9,07	5	25	45,34	989.540.519
1993/1994	1.171.612.102	9,07	7	49	63,48	1.354.899.560
1994/1995	2.296.054.843	9,36	9	81	84,25	1.860.798.196
-	-	-	-	-	-	2.555.591.594
-	-	-	-	-	-	3.509.810.150
-	-	-	-	-	-	4.820.319.224
-	-	-	-	-	-	6.620.152.210
-	-	-	-	-	-	9.092.015.123
Jumlah	6.389.554.794	86,45	0	330	22,76	-

Sumber: Data primer, diolah

Persamaan Trend Eksponensial yang dikemukakan oleh Van Matre 1983, hal. 475 sebagai berikut :

$$Y = b_0 b_1 \tag{1}$$

Untuk mencari harga-harga a dan b pada persamaan tersebut digunakan bantuan logaritma, sehingga persamaannya menjadi :

$$\begin{aligned} \text{Log } Y &= \text{Log } b_0 + \text{Log } b_1 \cdot X \tag{2} \\ \text{Log } b_0 &= \frac{\sum \text{Log } Y}{n} \\ \text{Log } b_1 &= \frac{\sum \text{Log } Y}{\sum X^2} \end{aligned}$$

Persamaan PP I Perhotelan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Log } b_0 &= 8,6496344906 \\ \text{Log } b_1 &= 0,0688960873061 \end{aligned}$$

Persamaan Trend bentuk eksponensial dapat diperoleh dari anti logaritma nilai Log b₀ dan Log b₁ :

$$\begin{aligned} Y &= b_0 b_1 \\ Y &= 446.307. 813,4 (1,17191493)^x \end{aligned}$$

dimana:

$$\begin{aligned} Y &= \text{Trend penerimaan selama 1 tahun} \\ X &= \text{Unit waktu (tahun)} \end{aligned}$$

Dari persamaan eksponen tersebut, dapat dicari harga-harga trend dari tahun 1985/1986-1994/1995, seperti pada tabel 3.

ANALISIS SWOT

Selama tahun 1985/1986-1994/1995, kepariwisataan di Kodya Yogyakarta telah mencapai kemajuan yang pesat, dengan pertumbuhan penerimaan PP I Perhotelan yang cukup menggebirakan. Dalam kemajuan yang diraih, banyak kendala yang diraih dari tahun ke tahun,

baik oleh faktor internal dan eksternal. Oleh karena itu, untuk menghadapi pembangunan di masa yang akan datang, hasil yang diperoleh harus dapat dipertahankan dengan sebaik-baiknya, dan dapat dijadikan untuk pemilihan strategi dan pengambilan kebijakan. Untuk menyusun strategi yang digunakan oleh Dinas Pendapatan Daerah dalam pemungutan, perlu menganalisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threat*) perlu digunakan dalam menganalisis pemungutan pajaknya.

Strengths

(1). Data wajib pungut jelas, dan tidak dapat disembunyikan, khususnya untuk hotel berbintang dan hotel melati. (2). Mudah menetapkan besarnya nilai kena pajak. (3) Mudah dilaksanakan penagihan karena wajib pungut jelas lokasinya.

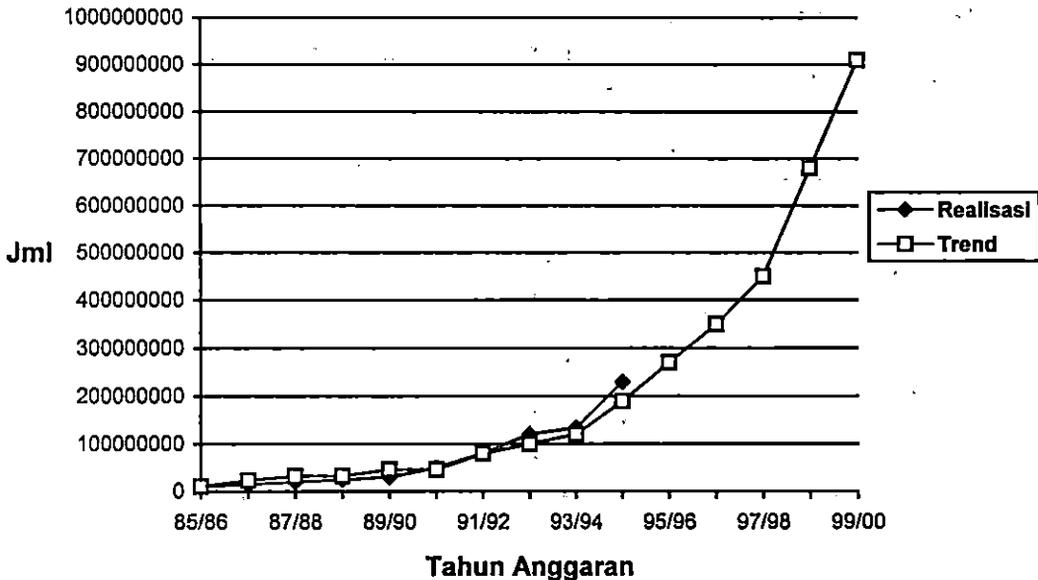
Weaknesses

(1). Beberapa rumah penduduk pada saat-saat tertentu berubah fungsinya sebagai penginapan, atau penginapan yang pada saat-saat tertentu menyewakan kamar lebih dari yang terdaftar di Dipenda, pada umumnya tidak memiliki ijin usaha, sehingga sangat sulit didata secara pasti. (2). Anggapan oleh sebagian pemilik hotel atau penginapan, bahwa membayar pajak akan mengurangi pendapatan yang seharusnya mereka terima. Ini terjadi karena kebanyakan hotel melati 1,2, dan pondok wisata, harga tidak termasuk pajak, dan tamu akan menolak jika dikenai tambahan biaya untuk pajak. (3). Data yang didapat atau yang dilaporkan pihak hotel sering tidak akurat. (4). Terbatasnya jumlah dan kemampuan personil Dinas Pendapatan Daerah. (5). Kurang jujurnya wajib pungut dalam memberikan data yang jelas dan benar.

Opportunities

(1). Masih banyak potensi yang dapat digali melalui ekstensifikasi dan intensifikasi. (2). Melakukan peninjauan kembali penetapan pajak untuk kurun waktu tertentu. (3). Sanksi dapat dikenakan kepada wajib pungut sesuai peraturan

Gambar 2
Grafik Trend Penerimaan Pajak



yang ada. (4). Dengan dibukanya Penanaman Modal Asing di Kodya Yogyakarta, pada investor asing dapat dimanfaatkan untuk membantu hotel yang pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan PP I Perhotelan. (4). Perkembangan akomodasi perhotelan dapat memberikan peluang pada meningkatnya PAD, dan dapat dijadikan sebagai salah satu andalan penerimaan pajak.

Threats

(1). Masih ada kesadaran wajib pungut yang rendah. (2). Ketrampilan petugas relatif kurang. (3). Sering terjadi salah perhitungan dalam penetapan pajak. (4). Adanya kerja sama antara wajib pungut dengan petugas pajak, sehingga pemeriksaan buku tidak teliti. (5). dengan diijinkannya penanaman modal asing di bidang perhotelan di Kodya Yogyakarta, maka pengusaha perhotelan di Yogyakarta akan menghadapi semakin banyak pesaing. Bahkan PMA itu dapat mengancam kelangsungan hidup hotel yang

setaraf ataupun di bawahnya, sehingga akan mengurangi penerimaan pajak.

Sedangkan Strategi yang digunakan adalah:

Tujuan Atau Misi

Merupakan tujuan yang ingin dicapai di masa yang akan datang, yaitu mencapai peningkatan penerimaan PP I yang stabil.

Strategi Dan Rencana

Merupakan langkah untuk mencapai tujuan. Strategi dan rencana yang cocok untuk memperbaiki faktor-faktor internal untuk mencapai pertumbuhan penerimaan PP I Perhotelan yang terus meningkat, disertai dengan efektifitas. Rencana tindakan yang dapat dilaksanakan : Inventarisasi obyek pajak, peninjauan kembali tarif yang ada sekarang, sistem pemungutan pajak, dan sistem pemantauan/supervisi: "

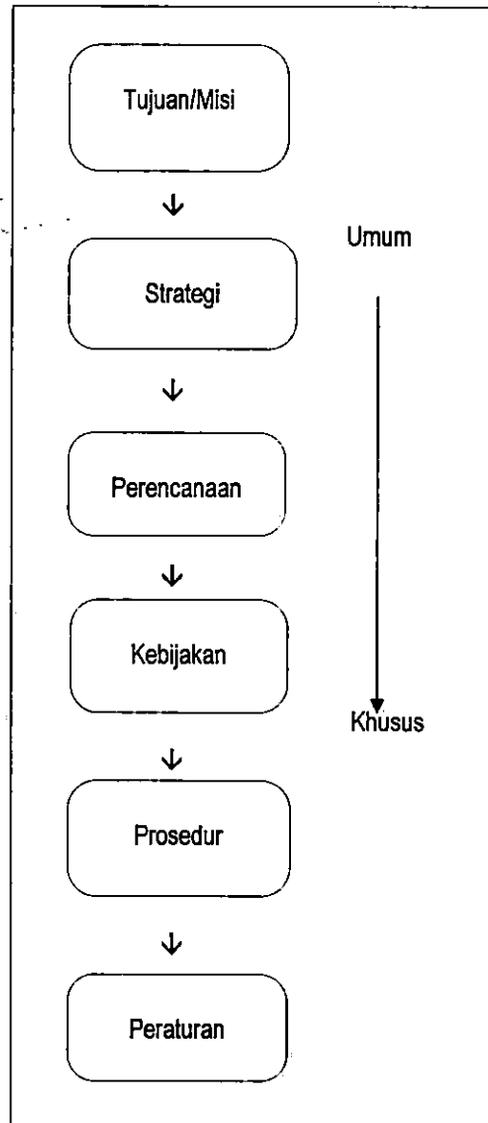
Kebijakan, Prosedur, dan Aturan

Kebijakan dikembangkan untuk memberikan petunjuk kepada tindakan operasional. Sedangkan prosedur memberikan petunjuk dalam penanganan bagian khusus, yang biasanya diikuti oleh aturan-aturan tertentu. Dalam hal ini, kebijakan, prosedur, dan aturan yang dapat dilakukan antara lain :

1. Inventarisasi atas perhotelan dan penginapan di seluruh wilayah Kodya Yogyakarta. Prosedur yang dilakukan dengan peninjauan secara rutin langsung ke lapangan untuk mencari data-data yang pasti dilakukan dengan menjangkir wajib pajak baru, pembaharuan data atau membandingkan data yang sudah ada dengan kenyataan di lapangan. Ini dilakukan untuk penghitungan potensi peningkatan efisiensi dengan peningkatan kemampuan personil petugas pajak. Hal ini dapat dilakukan dengan menyelenggarakan pelatihan keuangan dan komputer bagi pegawai Dipenda, menyiapkan bentuk penilaian pajak yang digunakan oleh personil Dipenda, penugasan personil Dipenda untuk menilai masing-masing pajak, menerapkan aturan bahwa setiap petugas pajak harus mempunyai standar kemampuan dan pengetahuan minimum di bidang peningkatan PAD.
2. Meningkatkan pemantauan dan supervisi, dengan membentuk satu tim terpadu untuk mengadakan inspeksi mendadak atau rutin, dan pemberian sanksi atau denda bagi yang melanggar ijin pendirian hotel.
3. Peningkatan kesadaran membayar pajak. Prosedur pelaksanaannya dapat dilakukan oleh petugas pemungut pajak sendiri, ataupun dengan melalui kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, pemuka agama, dan masyarakat. Aturan dapat diterapkan dengan memberi sanksi tegas kepada masyarakat yang terlambat membayar pajak dan masyarakat yang menghindari pajak.

Untuk lebih jelasnya, Donald F. Harvey memberikan hirarki penetapan tujuan sampai ke peraturan sebagai berikut : (Gambar 3)

Gambar 3
Dari Tujuan Umum ke Peraturan Spesifik



SIMPULAN

Potensi PP I Perhotelan di Kodya Yogyakarta selalu mengalami peningkatan dari tahun 1985/1986 - 1994/1995, dengan pertumbuhan rata-rata per tahun 34,7%. Sedangkan penetapan target terhadap potensi baru sebesar 25,22% per tahun. Ini menunjukkan bahwa penetapan target belum sesuai dengan potensi yang ada, oleh karena itu sangat perlu ditingkatkan.

Tingkat efisiensi PP I Perhotelan sebesar 23,47%, dan ini dapat dikatakan efisien, yang berarti 23,47% dari realisasi pajak digunakan untuk biaya pemungutan.

Tingkat efektifitas pemungutan PP I Perhotelan di Kodya Yogyakarta belum efektif, karena baru dapat dipungut pajak sebesar 28,86% rata-rata per tahun, dari potensi yang seharusnya. Ini terjadi karena penetapan target kurang memperhitungkan potensi yang ada.

Peramalan penerimaan PP I Perhotelan untuk 5 tahun yang akan datang selalu mengalami kenaikan yang semakin tinggi, dan ini menggambarkan prospek penerimaan pajak yang menggembirakan di tahun-tahun yang akan datang.

Dari analisis SWOT yang dilakukan, dapat diketahui faktor eksternal yang berupa kekuatan dan kelemahan, serta faktor eksternal yang berupa kesempatan dan ancaman dalam pelaksanaan pemungutan baik dari pihak personil Dipenda maupun dari pihak pengusaha hotel sendiri.

Dalam rangka meningkatkan penerimaan PP I Perhotelan, diperlukan strategi rencana untuk mencapainya. Strategi yang dicanangkan untuk tahun-tahun yang akan datang adalah memperbaiki faktor-faktor internal untuk mencapai pertumbuhan pajak yang meningkat, disertai dengan efektifitas. Hal ini dapat terwujud jika didukung oleh masyarakat dan instansi yang terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian Lians, (1985), "Pendapatan Daerah dalam Ekonomi Orde Baru", *Prisma no. 4*, Jakarta, LP3S,
- Bank Indonesia, (1996), *Statistik Ekonomi - Keuangan Indonesia*, Jakarta, Oktober.
- Biro Pusat Statistik, *Kotamadya Yogyakarta Dalam Angka*, BPS DIY, 1984 - 1995.
- Biro Pusat Statistik, *Produk Domestik Regional Bruto*, BPS DIY, 1984 - 1995.
- Biro Pusat Statistik, *Statistik Kesejahteraan Rakyat*, BPS DIY, 1995.
- Biro Pusat Statistik, *Statistik Pariwisata DIY*, 1995.
- Biro Pusat Statistik, *Statistik Perhotelan Dan Akomodasi DIY*, BPS DIY, 1984 - 1995.
- Budiono, Dr, (1982), *Ekonomi Mikro (Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi)*, Yogyakarta, BPFE.
- Davey K.J., (1988), *Pembiayaan Pemerintah Daerah*, Jakarta, UI-Press
- Devas, Nick, (1989), *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*, Vip, Jakarta
- Departeman Dalam Negeri, (1990), MAPATDA. Manual Administrasi Pendapatan Daerah, Jakarta,
- Due, F John terjemahan Iskandarsyah dan Arif Janin, *Keuangan Negara*, UI - Press, Jakarta.
- Eko Lesmana, (1992), *Sistem Perpajakan di Indonesia*, Jakarta, Prima Kampus Grafika

- Enns, Philip G., (1985), *Business Statistic Method & Amplication*, Illionis, USA, Richard D. Irwan Inc,
- Fisher, Ronald C., (1996), *State And Local Public Finance*, USA, Times Mirror Higher Education Group.
- Goedhart, (1973), *Garis-garis Besar Ilmu Keuangan Negara*, terjemahan Ratmoko,SH, Jakarta, Penerbit Djambatan
- Granger,C.W.J., (1980), *Forescasting In Business And Economics*, New York, Academic Press.
- Guritno Mangkusubroto, (1993), *Ekonomi Publik*, Yogyakarta, BPEE
- Harvey, Donald F., (1986), *Business Policy And Stategic Management*, Ohio, USA, Charles E. Merrill Publishing Co.
- Insukindro, "Money Suply For Indonesia 1972 - 1982", *Occasional Paper*, tidak diterbitkan.
- JB. Kristiadi, (1985), *Masalah sektor Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Prisma*, No. 12,
- Josef Riwu Kaho, (1988), *Prospek Otonomi Daerah Di Negara RI, Identifikasi Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Penyelenggarannya*, Jakarta, Rajawali Press
- Kunarjo, (1992), *Perencanaan Dan Pembiayaan Pembangunan*, Jakarta, UI - Press
- , (1990), *Draft PJM Laporan Utama : Tahap V, Yogyakarta Urban Development Project*, tidak diterbitkan.
- Mardiasmo, (1992), *Perpajakan*, Yogyakarta, Andi Offset
- Musgrave, Richard A & Peggy B., (1982), *Public Finance, in Theory & Practice*, Tokyo, Me. Graw-Hill
- , (1995) *Nota Keuangan RI dan RAPBN*
- Oka A. Yoeti, (1996), *Anatomi Pariwisata*, Bandung, Penerbitan Angkasa
- Oka A. Yoeti, (1997), *Pemasaran Pariwisata Terpadu*, Bandung, Penerbit Angkasa
- Pangestu Subagyo, (1986), *Forecasting Konsep dan Amplikasi*, Yogyakarta, BPFE.
- , *Perda DIY No. 13 Tahun 1986 Tentang Pengaturan Usaha dan Penggolongan Losmen.*
- Soekadijo, (1996), *.Memahami Pariwisata Sebagai Systemic Linkage*, Jakarta, Gramedia
- Soetrisno PH., (1982), *Dasar-dasar Ilmu Keuangan Negara*, Yogyakarta, BPFE.
- Stickland, Tomphson, (1984), *Strategic Management Concept & Cases, 3 th ed.*, Texas, Business Publication Inc.
- Suparmoko, (1992), *Keuangan Negara Dalam Teori Dan Praktek*, Yogyakarta, BPFE.
- Van Matre, Joseph G. & Gilbreath G., (1983), *Statistic for Business and Economics*, Plano, Texas, Business Publications, Inc.
- , *Undang-Undang no. 5 tahun 1974, Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.*